

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sister City sering juga disebut sebagai *Twinning City* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kota kembar merupakan kerjasama yang terjalin antara kota yang bersifat luas, disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang. Wujud dari kerjasama ini kemudian diadopsi oleh Padang-Hildesheim melalui kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim yang diresmikan pada tanggal 20 Juni 1988 oleh Sjahrul Ujud, S.H selaku Walikota Padang dan Dr.Wilhelm Buerstedde selaku Walikota Hildesheim (*Oberstadtdirektor*).

Kerjasama ini menghasilkan kesepakatan yang mencakup bidang teknik meliputi berbagai disiplin ilmu serta penerapannya di lapangan meliputi aspek perencanaan kota, air minum, penyempurnan sistem drainase pembuangan sampah, pola transportasi dan tata kota. Tidak hanya itu, kerjasama ini juga meliputi bidang pendidikan peningkatan keahlian staf pemerintahan daerah, membantu pengembangan perguruan tinggi serta sekolah-sekolah kejuruan atau pendidikan formal. Kerjasama di bidang sosial budaya menyangkut instansi pembinaan kesenian daerah, peningkatan prestasi olahraga dan sebagainya.¹

Kerjasama *Sister City* Padang Hildesheim berlangsung dari tahun 1988 hingga tahun 2006, kerjasama ini sempat vakum selama 6 tahun dan kemudian dirajut kembali ditahun 2009, ketika gempa melanda kota Padang, pihak Hildesheim melakukan kunjungan ke Kota Padang guna memberikan bantuan serta merencanakan kelanjutan kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim hingga dilanjutkan kembali di tahun 2012 dengan menghasilkan MoU baru yakni *Minutes Aggrements*.

¹ Padang Kota Tercinta 1994:13

Namun, kerjasama ini tidak begitu ideal, di lapangan terlihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Padang mengenai kerjasama ini. Pemerintah Kota Padang terkesan kurang serius dalam kerjasama ini dibanding dengan kota-kota lain di Indonesia yang terlihat begitu antusias dalam Kerjasama *Sister City* seperti pendirian monumen kota Kembar ataupun hubungan yang terjalin erat diantara kota yang bekerjasama, berbeda dengan hal tersebut kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim belum terlihat pencapaian hingga sekarang, dan hingga sekarang Kerjasama ini telah berlangsung selama 28 tahun.

Penulis mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Agung Hendriarto selaku *Liasion Organizer* (LO) utusan Kota Padang ke Hildesheim tentang bagaimana pencapaian kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim. Dalam wawancara tersebut Hendriarto menjelaskan bahwa “Pemerintah Kota Padang tidak terlalu memprioritaskan Kerjasama *Sister City* karena Pemerintah Kota Padang lebih memprioritaskan agenda lain.”²

Meskipun begitu, Hildesheim sangat serius dalam kerjasama *Sister City* ini, terlihat dari berbagai bantuan yang diberikan Pemerintah Hildesheim yang bekerjasama dengan Pemerintah Pusat Jerman, melalui berbagai macam bentuk bantuan diantaranya beasiswa. Hildesheim melalui program *Engineers for Indonesia* (Efi) memberikan bantuan pendidikan terhadap anak muda Kota Padang diantaranya adalah melalui pertukaran pelajar, bantuan terhadap pembangunan kembali sekolah yang rusak maupun pertukaran informasi melalui pertukaran dosen, guru.

Dalam Efi sebuah wadah dari Pemerintah Jerman dalam mendukung pendidikan untuk anak muda Kota Padang yang disponsori oleh Prof. Dr.-Ing Hans-Peter Leimer dalam bentuk

² Hendri Agung Indrianto, (Kepala Dinas pariwisata Kota Padang/ L.O utusan Pemerintah Kota Padang dalam Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim), Kantor Dinas Pariwisata Kota Padang.10-11

proyek sosial dari Patronage Rotary Jerman dan didukung juga oleh Universitas *Hochschule Fur Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim* dan Pemerintahan Hildesheim

Tujuan dari diadakannya Proyek Sosial *Enginer for Indonesia* adalah untuk mendukung pendidikan arsitektur dan teknik sipil untuk anak muda Kota Padang .³ Keseriusan Hildesheim juga terlihat dari meningkatnya jumlah beasiswa yang diberikan dari tahun ke tahun seperti terlihat dalam table dibawah ini:

Tabel 1. Bantuan dari Pemerintahan Hildsheim

<i>Tahun</i>	<i>Forderbetrag</i> <i>(rupiah)</i>	<i>Forderbetrag</i> <i>(euro)</i>
<i>2006/2007</i>	<i>14.800.000</i>	<i>1.295,97 euro</i>
<i>2008</i>	<i>25.860.667</i>	<i>1.851,42 euro</i>
<i>2009</i>	<i>25.860.667</i>	<i>1.858,47 euro</i>

Sumber: diolah langsung oleh penulis berdasarkan data dari Dr.-Ing.Hans-Peter Leimer.”*Enginers for Indonesia*”, Patronage Rotari, German, 2007

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dari tahun ke tahun bantuan beasiswa ini meningkat, beberapa kalkulasi bantuan Pemerintah Jerman melalui program *Engginers for Indonesia* yang mana beasiswa diberikan terhadap beberapa siswa.⁴ Pemerintah Kota Hildesheim juga memberikan bantuan sebesar 15.000 euro untuk kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Universitas Bung Hatta, dalam bantuan ini Pemerintah Hildesheim juga membantu dalam merekontruksi bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa diantaranya adalah bantuan terhadap bangunan Univeristas Bung Hatta dan Universitas Andalas, Rumah Sakit,

³ Dr.-Ing.Hans-Peter Leimer.”*Enginers for Indonesia*”, Patronage Rotari, German, 2007, hlm 7-8 .

⁴ Dr.-Ing.Hans-Peter Leimer.”*Enginers for Indonesia*”, Patronage Rotari, German, 2007, hlm 9-10.

Hotel, dan rekonstruksi di kampung Cina.⁵

Tidak hanya itu, Pemerintah Hildesheim melalui faksi di Dewan Kota Hildesheim Dr. Hartmut Hager dan Profesor Dr. Ulrich Hammer memberikan bantuan sebesar 2665 Euro untuk korban gempa, bantuan juga diberikan kepada bangunan-bangunan terdampak gempa yang mengalami kerusakan, serta bantuan terhadap pembangunan sekolah khusus untuk anak-anak disabilitas.⁶

Di sisi lain, Pemerintah Hildesheim melalui program “*Wir Brauchen Sie*” membuka peluang terhadap masyarakat Kota Padang untuk bekerja di Kota Hildesheim, program ini terjalin dalam rangka penguatan Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim dengan melakukan beberapa proyek-proyek di kota Hildesheim.⁷ Lebih lanjut Pemerintah Hildesheim kembali mencoba merajut kerjasama ini. Mereka mengadakan malam penggalangan dana sekaligus malam informasi tentang Kota Padang. Acara ini digagas Wali Kota Hildesheim kala itu, Dr. Kurt Machens, didukung oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia di Hamburg, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin, Organisasi Kemanusiaan MER-C Jerman dan masyarakat Minang dan Indonesia yang berdomisili di Jerman dan kemudian di tahun 2012 kerjasama di antara Padang-Hildesheim dirajut kembali pasca gempa yang melanda Kota Padang dengan menghasilkan sebuah perjanjian yakni *Minutes Agreement*.⁸

Kesepakatan ini menghasilkan beberapa perkembangan bidang kerjasama yang meluas meliputi kerjasama bidang lingkungan, pertukaran informasi dan pengelolaan limbah, tata ruang kota dan pengiriman Staf Pemerintah Kota dan pelatihan singkat di Hildesheim. Kerjasama ini

⁵ Stadt Hildesheim, 09.10.2009. “*Erdbebenopfer in Padang benötigen unsere hilfe-spenden auch Sie für die menschen in not*”, hlm 1-3

⁶ Stadtteilanzeiger ost-Innenstadter dalam www.hildesheimer-stadtteilzeitungen.dee hlm.3

⁷ Hildesheim weltweit verbunden” *stadtpartnerschaften und freundschaftliche Beziehungen*”, *Wir Brauchen Sie, Arbeitskreise Padang*, hlm 12

⁸ Priyambodo RH, “Padang-Hildesheim Perkuat jalinan Kota Kembar” diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/297000/padanghildesheim/perkuat/jalinan/kota/kembar>.

terus dilanjutkan dengan berbagai kesepakatan yang lebih berkembang daripada kesepakatan awal, namun melihat dari kerjasama awal yang tidak efektif kenapa kerjasama ini dirajut kembali.

Kerjasama Padang-Hildesheim pun telah berlangsung kurang lebih 28 tahun dan telah mengalami berbagai perkembangan yang pada awalnya hanya di bidang pendidikan, budaya, dan pertukaran informasi, dan kemudian dilanjutkan kembali dengan kesepakatan baru yakni *Minutes Agreement* dengan berbagai macam kerjasama lainnya, meskipun kerjasama tahap awal yang dilakukan dari tahun 1988-2009 tidak begitu efektif dilihat dari pencapaiannya di lapangan, namun kerjasama ini terus dilanjutkan dan digagas kembali oleh Pemerintah Hildesheim.



1.2 Rumusan Masalah

Kerjasama *Sister City* Padang-Hidelsheim telah berlangsung lebih kurang 28 tahun, kerjasama ini mencakup berbagai bidang khususnya di bidang pendidikan, budaya dan pertukaran informasi, Namun kerjasama ini tidak efektif dilihat dari pencapaiannya, akan tetapi kemudian kerjasama ini dirajut kembali oleh Walikota Hildesheim Kurt Machen dengan mengundang Walikota Padang dikala itu yakni Mahyeldi Ansharullah ke Hildesheim pada tahun 2012 , dan kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim dirajut kembali melalui kesepakatan *Minutes Agreement* dari berbagai bentuk data yang didapat oleh penulis terlihat jelas bahwasanya Pemerintah Hildesheim begitu serius dalam kerjasama *Sister City* ini dan berbanding terbalik dengan Kota Padang yang kurang serius dalam kerjasama ini. Hal inilah yang memberikan ketertarikan kepada penulis untuk meneliti faktor yang mendorong Hildesheim untuk melanjutkan kerjasama ini.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang akan dijawab di dalam penelitian ini adalah: *faktor-faktor Pendorong Mengapa Jerman Menjalankan Kembali Kerjasama Sister City Padang-Hidelsheim?*

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang Hildesheim merajut kembali Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang malatarbelakangi Hildesheim dalam melanjutkan kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional mengenai, apa faktor pendorong Hildesheim dalam melanjutkan Kerjasama Hildesheim. Dengan menjelaskan Kerjasama *Sister City* Kota Padang-Hidelsheim, diharapkan penelitian ini bisa menjadi tolak ukur terhadap Pemerintah Kota Padang dalam menjalankan Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi pemegang kepentingan di tingkat daerah terkait implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan kerjasama *sister city* Padang-Hildesheim ditinjau berdasarkan kajian hubungan internasional

1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka memuat penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang relatif sama. Tujuan pencantuman studi pustaka adalah sebagai pembanding agar terdapat kebaruan di dalam penelitian. Studi pustaka ini juga dimaksudkan untuk menampilkan karya-karya orang lain

yang dijadikan acuan oleh penulis. Di bawah ini penulis mencantumkan sejumlah literatur yang sesuai dengan studi pustaka:

Pertama adalah tulisan dengan judul “Efektifitas Kerjasama *Sister City* Kota Semarang (Indonesia) Dengan Brisbane (Australia) Tahun 2002-2007” yang ditulis oleh Eka Titiyani A. Penelitian ini meneliti tentang efektivitas kerjasama *sister city* Kota Semarang (Indonesia) dengan Brisbane (Australia) yang dinilai sangat penting bagi Semarang serta menghasilkan keuntungan yang komersial bagi kedua negara. Namun kerjasama ini tidak berjalan lancar dan kurang efektif, karena tidak adanya simbol yang melambangkan adanya kerjasama *sister city* antara ke dua kota beda negara ini.

Sejak abad 20, Hubungan Internasional telah mengalami banyak perubahan, serta semakin kompleksnya jenis-jenis kerjasama seperti *sister city* atau dikenal juga dengan *sister province*. Hal itu didasarkan oleh tingkat hubungan yang memenuhi kepentingan nasional suatu negara dan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan nasional setiap nasional negara tersebut yaitu dengan cara kerjasama. Kerjasama tersebut tidak hanya antara negara-negara, namun juga antara kota di negara yang berbeda. Pada awalnya kerjasama *Sister City* berasal dari kerjasama antara kota di Eropa dan Amerika Serikat sejak tahun 1950-an. Ide awal *Sister City* dicetuskan pertama kali pada tahun 1956 oleh Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower. Pada mulanya penerapan konsep ini adalah sebagai sarana diplomasi politik negara di tingkat regional dan internasional. Pengimplementasiannya menjadi pendorong bagi rakyat untuk menjalin persahabatan dan kerjasama yang konstruktif, baik antara elemen masyarakat, kota, antara pemerintah lokal dan pusat maupun antara negara-negara di seluruh dunia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, maka daerah dapat melakukan hubungan luar negeri. Oleh karena itu hubungan kerjasama *Sister City* mempunyai arti yang strategis karena bertemunya pusat-pusat

pertumbuhan dan perkembangan kota dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan.

Pelaksanaan kerjasama *sister city* sudah sesuai dengan kebutuhan daerah, sedangkan metodologi yang dipakai dalam skripsi ini adalah kerjasama (*cooperation*) dalam kerjasama Semarang-Brisbane. Penelitian ini pada dasarnya menjelaskan tentang efektifitas kerjasama *Sister City* Semarang dengan Brisbane yang kerjasama ini masih terus diperpanjang, karena sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun masih banyak masyarakat Semarang yang tidak mengetahui serta belum mengerti akan adanya kerjasama kedua kota beda negara ini. Sehingga dapat dikatakan belum efektifnya kerjasama *Sister City* ini pada beberapa bidang yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, yang terdapat dalam perjanjian kerjasama/*Memorandum of Understanding* (MOU).

Sejalan dengan kebijakan kerjasama antar kota yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, tidak lagi dapat dilihat hanya terbatas dalam bidang ekonomi, tetapi pada akhirnya (perlu ditelaah) akan membawa dampak meliputi berbagai bidang kehidupan. Maka itu makna kerjasama dalam cakupan global juga menjadi lebih luas. Indikator yang dipakai untuk mengukur implikasi juga menjadi lebih luas tidak sekedar indikator-indikator ekonomi saja.

Dalam bidang kebijakan publik, kriteria yang digunakan dalam proses perumusan strategi/kebijakan pembangunan juga berubah, tidak lagi sekedar kriteria ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan konsumsi, investasi, tingkat pertumbuhan dan jumlah ekspor atau impor dan sebagainya.

Ataupun sasaran untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik, mendorong upaya mewujudkan kemandirian daerah, meningkatkan kemampuan daerah dalam persaingan global, mewujudkan kerjasama antar kota/daerah yang saling menguntungkan, dan mewujudkan *International Networking* dan *International Friendship*.

Sementara yang membedakan adalah penulis ingin melihat apa faktor pendorong yang melatarbelakangi Hidelsheim dalam melanjutkan kerjasama *Sister City* Padang-Hidelsheim dimana kerja sama ini telah berlangsung lama namun tidak begitu efektif bila dilihat dari implikasinya, Sementara itu skripsi Eka Titiyani ini lebih kepada adanya perkembangan kerjasama *sister city* yang tidak hanya satu bidang namun berbagai bidang.⁹

Kedua, penulis melihat dari skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurkhaliq Djirimu mengenai “Peluang dan Tantangan Kerja Sama *Sister City* Kota Bau-Bau dan Seoul Tahun 2013.” Dalam skripsi ini Muhammad Nurkhalq Djirimu memfokuskan penelitiannya terhadap kebudayaan dimana adanya persamaan cara penulisan di salah satu Kota Baubau dengan aksara Korea yakni Hagul, sehingga kerja sama diantara kedua negara dapat terjalin bersama demi keberlangsungan tulisan Hagul sementara itu melalui regionalisme penulis memfokuskan adanya kerjasama regional yang respiokal, saling memahami serta berinteraksi satu sama lain. Bentuk regional tersebut dapat dilihat melalui tingkat kohesi sosial (Etnis, Ras, Bahasa, Agama, Budaya, Sejarah Kesadaran, serta Warisan Bahasa) serta kohesi ekonomi (pola-pola perdagangan) kohesi politik dan organisasi.

Dari hasil penemuannya adalah penerapan masuknya budaya Korea melalui *Frame* kerjasama *Sister City* Kota Baubau-Seoul diawali dengan misi penyelamatan bahasa suku Cia-cia yang terletak di wilayah Kota Baubau terancam punah oleh para peneliti linguistik, sehingga dengan kerjasama *Sister City* pemerintah diantara kedua pihak, dapat bekerjasama melalui adopsi sistem penulisan haggul, dan demi melestarikan bahasa tersebut, dan juga ini menjadi isu strategis untuk menunjukkan kapabilitas yang dimiliki dan dicapai oleh Pemerintah Kota Baubau-Seoul dan kerja sama dengan NGO Korea. Sementara dari pihak penulis sendiri, penulis meneliti

⁹, Eka Titiyani A,” *Efektivitas Kerja sama Sister City Kota Semarang (Indonesia) Dengan Brisbane (Australia)*”, 2002-2007

apa faktor pendorong Hildesheim dalam melanjutkan kerjasama *Sister City* Padang-Hidelsheim.¹⁰

Ketiga, penulis mengambil laporan penelitian Narsif, S.H., M.H. Fakultas Hukum tentang Kerjasama Sama Luar Negeri di Bawah Departemen dalam Negeri (studi kasus *Sister City* Padang- Hidelsheim) tahun 1995. Narsif telah melakukan penelitian *Sister City* di kota Padang melalui Perspektif dari Hukum Internasional, dan juga bagaimana Pemerintah Pusat melihat kerja sama antara daerah dalam hal hukum nasional dan internasional dan pengawasan pemerintah melalui PERMENDAGRI hasil temuannya adalah ini merupakan kerja sama bentuk baru dari pelegalan wewenang Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tingkat II Padang, dasar hukum ini harus meliputi:

- a. Prinsip dasar Hukum Internasional
- b. Prinsip-Prinsip Hukum Nasional

Dan keduanya tidak bertentangan satu sama lain. Sedangkan penulis sendiri melihat sisi penelitian ini melalui Kerjasama *sister city* Padang-Hildesheim, penulis melihat apa faktor Hildesheim dalam melanjutkan kerjasama *Sister City* Padang-Hidelsehim mengingat kerjasama ini tidak efektif dari pencapaiannya namun dirajut kembali.¹¹

Keempat, “Urgensi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja sama *Sister city* di Indonesia” oleh Renata Edazar Yosephine Manullang di tahun 2014. Dewasa ini, hubungan luar negeri tidak hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai subyek hukum internasional saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dari suatu negara. Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk kerjasama dan bukannya suatu Perjanjian Internasional yang subjeknya negara. Kerjasama ini dikenal dengan istilah *Sister City*.

¹⁰ Djirimu Muhammad Nurkhaliq “*Peluang dan Tantangan Kerja Sama Sister City Kota Bau-Bau dan Seoul*, 2013.

¹¹ Narsif.SH.MH. Fakultas Hukum kerja sama luar negeri dibawah Departemen dalam Negeri (studi kasus *Sister City Padang- Hidelsheim*),1995.

Sister City mulanya dilakukan oleh kota-kota di Benua Amerika dengan negara lain di luar Amerika. Kerjasama yang dilakukan pertama kali oleh Kota Seattle, Washington D.C. dengan Kota Kobe, Jepang. Kerjasama ini kemudian berkembang menjadi 1992 kerjasama yang dilakukan oleh 694 kota di Amerika. Dari kerjasama *Sister City* yang dilakukan oleh kota-kota di Amerika ini akhirnya diikuti oleh kota-kota lain yang ada di Asia dan Eropa. Indonesia sendiri telah aktif melakukan kerjasama *Sister City* dengan kota dari negara lain.

Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang ditulis oleh Prof. Dr. Agustinus Supriyanto S.H., M.Si tahun 2003, Indonesia pertama kali melakukan kerjasama *Sister City* pada tahun 1992 yang dilakukan oleh Kota Jakarta dengan Kota Berlin Jerman. Fokus penelitian ini lebih kepada sejauh mana kerjasama *Sister City* dalam kemajuan ataupun melihat manfaat dari kerja sama sister city ini, serta perjalanannya di Kota-Kota Indonesia. Metodeologi yang dilihat dari penelitian adalah lebih kepada Hukum Internasional dimana negara adalah subjek hukum internasional sehingga memiliki kewenangan dalam menjalin hubungan dengan negara lain, yang membedakan dari penelitian ini adalah, penulis melihat unit level analisisnya melalui *sub-state* dan kemudian melihat apa faktor pendorong Hildesheim dalam merajut kembali kerjasama *sister city* Padang-Hildesheim.

Kelima, Penulis melihat melalui Implementasi Kerja sama *Sister City* Bandung-Braunschweig (2000-2013) oleh Hendrini Renola Fitri dan Faisyal Rani melalui jurnal penelitian tersebut Pemerintah Bandung-Braunschweig dinilai sukses menjalankan kerjasama *Sister City*, hal ini dapat terlihat bagi pembangunan kota dibanding diantaranya:

Ekonomi, Perdagangan dan Investasi, Industri, Pariwisata.

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Administrasi.

Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan, Sosial Pemuda dan Olahraga.

Bidang-bidang lain yang kemudian disetujui oleh kedua pihak.

Kemudian Pemerintah Bandung dengan meningkatkan potensinya dengan mengembangkan kerja sama, salah satunya dengan mengembangkan kerjasama *Sister City* dengan kota dalam negeri maupun luar negeri. Metodologi yang dipakai adalah kerja sama internasional dengan konsep neo-liberalisme, untuk mengadakan sebuah kerjasama *Sister City*, terdapat banyak pertimbangan kota lain di Luar Negeri yang memiliki kualitas unggul tidak kalah dengan kota Braunschweig. Namun pada realita implementasinya, Bandung lebih memilih Braunschweig sebagai rekan kerjasama *Sister City* nya yang pertama, hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni:

- a. Adanya kesamaan karakteristik
- b. Adanya kepentingan bersama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesamaan karakteristik kedua kota dapat juga membawa dampak positif kekuatan jangka panjang maupun pendek, lebih efektif serta efisien dalam menggapai kepentingan bersama.¹² Sementara itu penulis melihat perbedaan di antara kasus ini adalah bahwa kedua kota Bandung-Braunschweig termasuk kota besar di masing-masing negara sehingga terkesan saling berlomba dalam kerja sama ini, dalam penelitian tersebut terlihat jelas implikasi kerjasama *Sister City* Bandung-Braunschweig berbanding terbalik dengan Kota Padang yang mana kerjasama *Sister city* ini tidak berjalan dengan baik, namun dirajut kembali oleh Walikota Hildesheim

1.7 Kerangka Konseptual

¹² Hendrini Renola Fitri & Faisyal Rani, "Implementasi Kerjasama *Sister City* Bandung-Braunschweig, 2000-2013.

1.7.1 Kerjasama Internasional

Perjanjian Westphalia atau *the peace of westphalia* atau *the westphalia treaty*, tahun 1648, Jerman yang mengakhiri perang Eropa selama 30 tahun, berhasil memancang tonggak sejarah dengan dibentuknya negara-negara secara modern dengan konsep *nation-state*, dan merupakan permulaan terjadinya sistem hubungan internasional yang disebut *westphalia system*.¹³

Sementara itu dengan adanya perkembangan yang terjadi di hubungan internasional ditandai dengan berbagai kerja sama internasional dan berkembangnya beberapa aspek kerja sama internasional negara di dunia memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yang tampak semakin nyata dan titik beratnya adalah adanya upaya peningkatan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi dengan saling percaya menghargai dan saling menghormati. Kerja sama internasional meliputi bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan kemanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu maupun negara lainnya.

Hubungan antar negara atau kerjasama antar negara dalam masyarakat internasional seringkali didasari oleh adanya persamaan diantara negara-negara tersebut, seperti persamaan keadaan geografis, ideologi, dan juga kepentingan politik dan ekonomi yang mengikat dalam hubungan kerjasama negara-negara.

Pengertian kerjasama internasional itu sendiri menurut Koesnadi Kartasasmita merupakan: “Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan-kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena *national understanding* dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung untuk

¹³Osiander, Andreas, "sovereignty, *International Relations and westphalian Myth*", *International Organizations* 55", Spring 2001, hlm.251, the IO Foundation and Massachusettes institute of technology

kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama di antara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik.”¹⁴

Kerjasama Internasional dalam aplikasinya dapat dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

1. Kerjasama Intra-Regional: merupakan suatu kerjasama yang dilakukan atau dilaksanakan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan (*region*), seperti di Asia Tenggara yaitu ASEAN, di Timur-Tengah yaitu Liga Arab, di Amerika Utara dengan NAFTA dan Tran Atlantik NATO.
2. Kerjasama Inter-regional: merupakan suatu kerjasama yang dilakukan atau dilaksanakan di antara negara-negara di kawasan lain, seperti kerjasama antara Eropa dengan Jepang.
3. Kerjasama Multilateral dan Bilateral: kerjasama multilateral adalah kerjasama antara dua negara atau lebih, sedangkan kerjasama bilateral adalah kerjasama yang hanya dilakukan oleh dua negara.¹⁵

Dalam kaitan ini pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Kota Padang dengan Kota Hildesheim adalah kerjasama bilateral. Menurut Kusumohamidjojo, kerjasama bilateral adalah suatu bentuk kerjasama di antara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi.”¹⁶

Berdasarkan peraturan di atas Kerjasama *Sister City* terbentuk karena adanya persamaan kedudukan dan status administrasi, persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi, persamaan

¹⁴ Koesnadi Kartasasmita, Organisasi dan Administrasi Internasional (Bandung: Fisip Universitas Padjadjaran Press, 1983), hal. 83 dalam Liberty Eduardo Zwageri Mozes, “Kerjasama Indonesia – Cina Dalam Promosi dan Pemasaran Pariwisata Bersama Terhadap Peningkatan Kunjungan Wisatawan Cina Ke Indonesia”, Skripsi Fisip-HI Unpas tidak diterbitkan, 2013, hlm. 12.

¹⁵ T. may Rudy dalam Skripsi Noer Utami P.M.S, hlm. 14

¹⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional-Kerangka Studi Analitis*, (Jakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 3.

karakteristik sosio-kultural dan topografi kewilayahan, persamaan permasalahan yang dihadapi, diantara kedua pihak dengan tujuan untuk membangun hubungan kerjasama dalam pertukaran kunjungan pejabat atau pengusaha, yang nantinya akan menimbulkan kerjasama dalam hubungan barang dan jasa. dan bidang kerjasama yang dilakukan oleh Kerjasama *Sister City* Kota Padang dengan Kota Hidelshiem adalah bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing negara berbeda sedangkan potensi dan sumber daya alam dan manusia kurang. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya ada di negara lainya kerja sama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib.

Dasar dari kerjasama internasional adalah kesejahteraan aktor yang terlibat dalam kerjasama, baik kerjasama bilateral sampai dengan multilateral. Kerjasama ini dilaksanakan oleh aktor dibandingkan harus melakukan kompetisi, berkonflik dan melakukan sendiri tanpa bantuan. Kerjasama ini bisa disebut sebagai langkah lebih mudah untuk mencapai kepentingan nasional.

Kerjasama yang dilakukan bisa berkaitan dengan interdependensi, akan terlihat dari proses kerjasama tertentu, negara mana yang lebih tergantung dari kerjasama ini. Meskipun skala ketergantungan akan ditutup-tutupi oleh negara yang melakukan kerjasama namun akan terlihat negara mana yang akan lebih tergantung.¹⁷ Adapun kerjasama yang lebih terfokus dengan skala yang lebih kecil, yaitu kerjasama antar pemerintah (*transgovernmental*). Hubungan *transgovernmental* merupakan kerangka hubungan interdependensi antarpemerintah kota atau pemerintah lokal negara. Maraknya hubungan yang semakin terbuka berbagai jenis saluran untuk

¹⁷ (Keohane dalam Gourevitch, 1992 : 624)

menjalin hubungan ini memunculkan hubungan baru yang secara langsung dimana pemerintah kota atau daerah tidak lagi terpaku oleh pemerintah pusat, hubungan ini disebut hubungan *transgovernmental*.

Hubungan ini muncul dikarenakan munculnya sensitivitas sub-unit pemerintah yaitu pemerintah daerah atau kota terhadap isu-isu yang terjadi, dan menganggap juga bahwa isu militer tidak bisa menjadi agenda utama pemerintah saja, isu-isu lain seperti kesejahteraan, lingkungan hidup, perekonomian perlu dibahas juga. Sensitivitas ini juga disebabkan oleh aktor-aktor lain seperti perusahaan bisnis, multinasional, dan bank.¹⁸

Secara definisi, hubungan *transgovernmental* adalah hubungan antar pemerintah negara dengan pemerintah negara lain, hubungan satu pemerintah dengan pemerintah lainnya. Keohane dan Nye mengatakan *transgovernmental* merupakan interaksi sub-unit dari pemerintah suatu negara yang tidak dikendalikan secara langsung oleh pemerintah pusat.¹⁹

Interaksi di sini memang tidak dikendalikan oleh pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah sebagai sub-unit pemerintah pusat tetap berporos kepada kebijakan nasional, dan kesepakatan yang telah buat oleh kedua pemerintah negara pusat melalui sebuah nota kesepahaman (*Momerandum of Understanding*).

1.7.2 Sister City

Sister city dalam pengertiannya bisa disebut juga sebagai kota kembar, dimana kerja sama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.²⁰ Dengan demikian *Sister City* hanya dapat diterapkan oleh dua di antara pemerintah kota atau daerah di kedua belah pihak dan terkadang di dukung oleh NGO, lembaga-lembaga non-profit, bahkan

¹⁸ Keohane dan Nye, 1974 : 42)

¹⁹ Ibid.43

²⁰ Andi Oetomo, *apa itu sister city ?* (Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pembangunan Kebijakan Sekolah Arsitektur.Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung Kebijakan Sekolah Arsitektur.Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung)

komunitas internasional, disamping itu kerjasama antar kota bersifat luas baik mencakup kerja sama ekonomi, pembangunan, pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, dan kebudayaan yang kemudian disetujui secara formal melalui penandatanganan di kedua belah pihak.

Andi Oetomo menuliskan awal diperkenalkannya *Sister City* dimulai ketika kota-kota di negara maju, seperti di Amerika dan di Eropa saling bekerja sama, sehingga terjadi keseimbangan dan kesetaraan kondisi sosial ekonomi, namun seiring dengan globalisasi yang tak terbendung, arus informasi yang cepat serta diikuti dengan niat bekerja sama demi mencapai kepentingan sehingga memunculkan konsep *sister city*.

Kerja sama akan terus dilanjutkan hingga memiliki *understanding*, manfaat yang positif dan niatan yang baik dalam bekerja sama demi mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing dalam hal ini adalah kerja sama antara Kota Padang-Hidelsheim. Di dalam kerjasama *Sister City* Kota Padang terdapat bidang-bidang yang disetujui dalam kerjasama. Menurut Donal Bell Souder & Shanna Bredel dalam *A Study of Sister City Relations*, bidang yang meliputi Kerjasama *Sister City* terbagi ke dalam:

1. Budaya, dalam konteks kerjasama budaya ditujukan untuk memahami keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat terjalinnya pemahaman mengenai latar belakang budaya, sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang lebih mendalam antar Kota dalam hubungan internasional, yang biasanya melibatkan unsur seni musik, pertunjukan budaya, dan hal lainnya yang menyangkut kebudayaan.
2. Akademik, dalam bidang akademik biasanya melibatkan pengiriman duta/ delegasi dari suatu kota ke kota lainnya yang ditunjukkan untuk mempromosikan dan mempelajari budaya lain untuk mempererat hubungan yang lebih mendalam.

3. Pertukaran informasi, dalam hal ini ditunjukkan untuk menanggulangi suatu kesamaan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat terselesaikan dan pengembangan hal ini dapat ditunjukkan untuk pembangunan kota yang lebih baik.
4. Ekonomi, merupakan bidang yang terpenting dalam kerjasama *Sister City*, hal ini berlandaskan pada tujuan peningkatan perdagangan antar kota, sehingga konteks kerjasama terjalin lebih mendalam.

Sister City sering juga di sebut *Twining City* atau dalam bahasa indonesia kota kembar, dimana kerjasama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang. Pengertian seperti itu lebih disukai oleh kelompok kota-kota di Amerika Serikat yang tergabung dalam *Sister Cities International* (SCI) yang berpusat di Washington DC. Oleh karena itu, istilah *Sister City* lebih banyak digunakan di Amerika Serikat (AS) dan kota-kota aliansinya di berbagai benua.²¹ SCI didirikan pada 1956 sebagai bagian dari *The National League of Cities* yang kemudian memisahkan diri menjadi NGO atau korporasi non-profit pada 1967.

Sedangkan *Twining City* lebih banyak digunakan oleh negara-negara Eropa yang tergabung dalam *Council of European Municipalities and Regions* (CEMR) di bawah Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan aliansinya di berbagai benua pula. CEMR tersebut didirikan sejak 1951 untuk mempromosikan kerjasama antar kota dan komunitas Eropa sebagai *driving force* untuk pertumbuhan dan pembangunan.²² Sementara di Indonesia istilah ini digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri adalah *Sister City*, dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata

²¹ Sister Cities International. 2010. *What Are Sister Cities?*. Washington, DC.

²² Council of European Municipalities and Regions. 2007. *Twining For Tomorrow's World: Practical Handbook*. Paris, CCRE & Brussels, CEMR

Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri.²³

Berdasarkan uraian di atas, maka skema *Sister City* berawal pada tahun 1951, kemudian Amerika Serikat di tahun 1956, dan selanjutnya Indonesia sendiri menggunakan secara formal pada tahun 1993. Meskipun sebenarnya jauh sebelum itu secara terbatas sudah dimulai di Indonesia, misalnya Pemerintah Kota Bandung dengan Braunschweig, Jerman yang menandatangani MOU kerjasama *sister city* pada Juni 1960, dan dengan Fort Worth, Amerika Serikat pada April 1990.²⁴

Sister City pada awalnya diciptakan pada tahun 1956 di *White House* oleh Presiden Eisenhower. Eisenhower membayangkan sebuah organisasi yang bisa menjadi pusat perdamaian dan kemakmuran dengan menciptakan ikatan antara orang-orang dari berbagai kota di seluruh dunia. Dengan membentuk hubungan ini, Presiden Eisenhower beralasan bahwa orang dari budaya yang berbeda bisa merayakan dan menghargai perbedaan mereka dan membangun kemitraan yang akan mengurangi kemungkinan konflik baru.

Sister City menciptakan hubungan berdasarkan budaya, pendidikan, informasi dan perdagangan bursa, menciptakan persahabatan yang lama yang dapat memberikan kemakmuran dan perdamaian melalui orang ke orang atau bisa disebut sebagai "*people to people Connection*." Sejak itu, Presiden Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, dan sekarang Presiden Barack Obama telah menjabat sebagai Ketua Kehormatan *Sister Cities International*.

Sejak awal, *Sister City* telah memainkan peran kunci dalam memperbarui dan memperkuat hubungan global yang penting. Kemitraan awal termasuk hubungan perdagangan antara Seattle,

²³ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri.

Washington dan Tokyo, Jepang, memperbaiki pasca Perang Dunia II ketegangan dengan menciptakan pertukaran budaya dan pendidikan, dan kemudian persahabatan yang erat.²⁵ Sebuah studi 1974 menemukan bahwa kebanyakan hubungan awal *Sister City* terbentuk dari program bantuan pasca Perang Dunia II ke Eropa Barat.

Jadi awal mula kerjasama *Sister City* didasarkan pada alasan budaya atau pendidikan. Di milenium baru, *Sister City* terus memperluas jangkauannya ke daerah baru. Dalam perkembangannya kerjasama ini, *sister city* mendedikasikan fokus khusus pada daerah dengan peluang yang signifikan untuk pertukaran budaya dan pendidikan, kemitraan ekonomi, dan bantuan kemanusiaan.²⁶

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode ekplanasi, metode eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta kerja sama *sister city* Kota Padang-Hidelsheim.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitain ini melihat apa faktor pendorong Hildesheim dalam merajut kembali kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim. Batasan waktunya adalah dari tahun 2000-2016. Mengingat kerjasama ini sempat terhenti dan dilanjutkan lagi di tahun 2012 dengan MOU baru yakni “*Minutes Agremeents*” dengan kesepakatan baru dan diberbagai macam bidang.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

²⁵ Ibid

²⁶ Sister Cities International. <http://www.sistercities.org>, “People-To-People Partnership: The White House Conference.” Audiovisual Collection, 1937-2002 (UA024) held by Special Collections Research Center at NCSU Libraries.Special Collections Research Center at NCSU Libraries. 1 October 2014. NCSU Libraries’ Audiovisual Collection, 1937-2002.http://d.lib.ncsu.edu/collections/catalog/AV2_FM_296-people2people#t=35

Singer membagi konsep dalam level analisis menjadi dua bagian diantaranya sistem internasional dan sub-nasional.²⁷ Dalam penelitian ini penulis memilih tingkat analisa sub-nasional dimana menurut David J. Singer yang dalam kajian analisis politik luar negeri terdapat sebuah asumsi bahwa untuk mencapai dalam interaksi hubungan internasional maka diperlukan atribut nasional berupa sikap negara dalam membuat sebuah keputusan.²⁸ Sedangkan sikap negara dalam membuat keputusan yang dimaksud dalam penelitian adalah sikap pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kerjasama *sister city*, ini dikarenakan pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah pusat dalam menangani segala segala urusan-urusan dan pengembangan kota padang melalui otonomi daerah atau bisa disebut juga sebagai desentralisasi. Begitupun juga dengan sebaliknya, melalui sistem desentralisasi ini pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh walikota masing-masing kota dalam membuat keputusan untuk melaksanakan kerjasama *sister city* dan membuat kesepakatan berdasarkan kesepakatan MOU.

Unit eksplanasinya adalah Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah (tinjauan pustaka) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yang kemudian akan dibahas dan dianalisis, literturnya berupa jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan permasalahan tergantung kepada validitas data dan informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu

²⁷ David J. Singer. "The Level of Analysis Problem in International Relations" dalam *World Politics*. Vol.14.No. 1, 1961, hlm. 77-92.

²⁸ *Ibid.*

penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber berikut:

- a. Dokumentasi
- b. Arsip
- c. Wawancara

Dari sumber data di atas, berikut penulis jelaskan beberapa hal mengenai poin-poin di atas:

- a. Dokumentasi

Dokumen-dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu melalui berita tertulis maupun dokumentasi dalam bentuk media dan yang berkaitan fokus dari penelitian terutama dalam menyangkut dokumen mengenai *sister city* beserta dampak dan implikasi terhadap pengembangan pendidikan di Kota Padang. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah menitik beratkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti.

- b. Arsip

Arsip yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi arsip yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang secara resmi mengenai kerja sama *sister city* antara Kota Padang-Hidelsheim yang dipublikasikan melalui *official website* milik Pemerintah Kota Padang serta perjanjian-perjanjian yang telah disepekatinya sehingga menjadi salah satu bagian dari arsip penelitian skripsi ini sehingga rekaman arsip tersebut dapat memperkuat analisis penelitian ini.

- c. Wawancara

Penentuan sumber informasi dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti. Untuk keperluan penelitian maka informan merupakan

pelaku yang secara langsung terlibat dalam kerja sama ini, maupun yang mendukung kerjasama ini, sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini mengutamakan teknik wawancara melalui *face to face*, dan via email lewat internet jika terjadi kendala dan hambatan, hal ini demi menjaga validitas data yang digunakan.

Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui:

- Observasi yaitu dengan melihat secara langsung situs-situs kerjasama *sister city* di Kota Padang.
- Wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait program-program *sister city* Kota Padang adalah dinas-dinas yang terkait dengan program-program kerjasama ini.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumen dan hasil olahan yang diperoleh dari berbagai sumber, adapun data sekunder yang dibutuhkan adalah:

- Dokumen-dokumen perjanjian *agreement, memorandum of understanding* (MOU) mengenai kerjasama *sister city* Kota Padang.
- *Official* resmi yang pernah memberitakan perihal kerjasama ini.
- Dokumen yang berasal langsung dari situs Official kedua kota yang berkerjasama, Padang-Hidelsheim.
- Dokumen yang berasal Hochschule Angewandte Wissenschaft und Kuenst (HAWK) dan Universitas Bung Hatta (UBH) selaku lembaga pendidikan yang dijadikan *partner* dalam kerjasama pendidikan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang dan tidak terungkap melalui data statistik, sehingga membutuhkan pendekatan melalui teknik pengumpulan data primer melalui wawancara, dan teknik pengumpulan data sekunder yang didapat dari kepustakaan dan dari dokumen-dokumen resmi, dan kemudian penulis akan menghubungkan serangkaian data tersebut yang telah diolah untuk dianalisa dan untuk mencari pemahaman dan kebenaran berdasarkan rumusan masalah yakni kepentingan Jerman dalam kerjasama *sister city* Padang-Hidelsheim.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah berangkat dari Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim dimana telah memakan waktu lebih dari 28 tahun, kerjasama ini sempat terhenti di tahun 2006, dan terkesan kurang efektif tetapi Pemerintah Hildesheim merajut kembali kerjasama ini, Pemerintah Hildesheim dalam kerjasama ini banyak memberikan bantuan baik berupa dana, pembangunan sekolah dan lain-lainya. Penulis menggunakan konsep kerjasama internasional dan *Sister City* dalam menganalisis fenomena kerjasama ini. Proses analisis penulis memakai metode penelitian kualitatif dengan cara penulisan yang eksplanasi agar tercapainya penelitian yang fokus dan koheren

1.9 Sistematika penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab pendahuluan beri alasan-alasan mengapa penulis mengangkat penelitian ini. Bab ini terdiri dari: latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, studi pustaka, landasan konseptual, dan teoritis, metodeologi penelitian, serta

sistematika penulisan.

BAB II: *Sister City* Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Jerman

. Bab ini berisi penjelasan dengan konteks-konteks pengetahuan yang sedang dipelajari, dalam bab ini penulis akan mengurai kerjasama *Sister City* dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Jerman

BAB III: Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim melalui perspektif Hildesheim.

Bab ini akan membahas hasil yang diperoleh dari kebijakan pemerintahan Kota Padang dalam melaksanakan kerjasama *sister city* dengan Hildesheim di berbagai bidang, dalam kurun waktu awal terbentuknya kerjasama ini hingga tahun 2012 yang berdasarkan pada kesepakatan MOU.

BAB IV: Analisa faktor pendorong Hildesheim dalam merajut kembali Kerjasama *Sister City* Padang-Hildesheim

Bab ini kan menjelaskan analisa bagaimana kerjasama ini berjalan dan kemudian penulis akan menarik sebuah kesimpulan apakah kerjasama ini berjalan efektif atau tidak.

Bab V : Penutup

Bab terakhir ini akan menyuguhkan kesimpulan dan sumbangan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini dengan harapan semoga bermanfaat penelitian yang telah didapatkan, disamping itu ini juga bentuk dari upaya dari bentuk refleksi demi kemajuan daerah.

